

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan tentang bagaimana Mekanisme Pengelolaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan Perda yang mengatur tentang Pajak Restoran, maka ada beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Padang sudah memiliki aturan yang jelas tentang mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
2. Dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Restoran, Badan Pendapatan Daerah melakukan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan instansi pemerintah lain maupun pihak ketiga.
3. Dengan Sistem Self Assesment mampu meningkatkan ketaatan pengelolaan dan pelaporan perpajakannya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
4. Dengan Sistem Self Assesment juga memperkecil peluang terjadinya kecurangan antara petugas wajib pajak dan wajib pajak.
5. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan Pajak Restoran yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dimana faktor pendukung yaitu Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Padang yang mengatur tentang sistem pengelolaan Pajak dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan pajak sangat memudahkan baik bagi Wajib Pajak maupun Sub Bidang Pendataan dan Penetapan yang menjadi pengelola pajak itu sendiri. Sedangkan faktor yang menghambat proses pengelolaan Pajak Restoran yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan hasil penjualan sesuai dengan omset yang diterima, ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan, kurangnya kompetensi oknum petugas Badan



Pendapatan Daerah Kota Padang hingga terjadi penyalahgunaan wewenang, seperti bermain-main dengan Wajib Pajak.

5.2 Saran

Dengan adanya kekurangan dan kelebihan pada mekanisme yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka ada beberapa saran yaitu:

1. Berkaitan dengan penyederhanaan prosedur administrasi yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat pembayar pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Pemerintah Kota Padang sebaiknya bisa mendorong Wajib pajak Restoran untuk menjalankan sistem online secara keseluruhan.
2. Berkaitan dengan ketidaktahuan wajib pajak atas aturan perpajakan. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bisa lebih mengintensifkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran untuk membangun kesadaran para pengusaha makan dan minuman akan kewajibannya sebagai wajib pajak.
3. Selain mengintensifkan sosialisasi, Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang harus menggunakan pendekatan persuasif kepada pengusaha restoran dan rumah makan. Memberikan pengertian selalu kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dan jujur.

